



## Industri Pertunjukan Musik Yang Terancam

*Djakarta Warehouse Project* (DWP) dikenal sebagai salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia yang berhasil menarik perhatian penonton dari berbagai belahan dunia. Pada edisi ke-16, berlangsung pada 13 hingga 15 Desember 2024 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, antusiasme publik terhadap acara ini membeludak. Sayangnya, insiden pemerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi terhadap penonton luar negeri menciptakan gelombang kontroversi yang dapat memberikan dampak serius terhadap industri musik tanah air. Kasus tersebut menggoyahkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai tuan rumah acara musik berskala global. Harus diakui, kejadian itu dapat meruntuhkan reputasi Indonesia di mata penyelenggara musik internasional dan penonton mancanegara. Bagi promotor musik Indonesia, membangun kembali kepercayaan ini memerlukan waktu, sumber daya, dan strategi khusus yang tidak dapat dilakukan secara instan.

### Industri Musik

Selama ini, ekosistem industri musik Indonesia masih sangat bergantung pada penyelenggaraan konser, dengan format acara besar untuk menarik investor, sponsor, dan audiens internasional. Insiden pemerasan oleh polisi berpotensi menurunkan minat sponsor untuk mendukung acara serupa di masa mendatang. Ketidakpercayaan sponsor dan *stakeholder* dapat merugikan penyelenggara karena mereka harus mencari sumber pendanaan lain yang tentunya menjadi semakin sulit, karena harus memulai lagi dari nol. Kehadiran penonton internasional menjadi salah satu daya tarik utama dari acara seperti DWP. Dengan adanya kasus itu, wisatawan mancanegara pasti akan berpikir dua kali sebelum menghadiri acara musik di Indonesia. Ini mengakibatkan efek domino. Penurunan jumlah pengunjung internasional tidak saja memengaruhi penyelenggara acara, tetapi juga sektor-sektor lain seperti perhotelan, transportasi, dan kuliner yang mendapatkan manfaat ekonomi -devisa- dari acara semacam itu.

Dampak jangka panjang juga terlihat pada hubungan antara pelaku industri musik lokal dan global. Indonesia selama ini terus berupaya menjadi pusat musik

elektronik di Asia, dan insiden memalukan itu dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya. Promotor musik dunia akan memilih negara lain yang dianggap lebih aman dan terpercaya untuk menjadi tuan rumah acara mereka. Dari sisi pengembangan talenta, berkurangnya acara musik berskala besar di Indonesia bisa mengurangi peluang bagi musisi dan DJ lokal untuk tampil di panggung internasional. Sebagai platform yang mempertemukan seniman dan penonton Indonesia dengan artis dan audiens global, DWP [dan acara serupa lainnya] memiliki peran penting mempromosikan Indonesia ke kancah panggung dunia.

Tidak hanya itu, dampak negatif ini dapat memengaruhi citra industri musik elektronik Indonesia secara keseluruhan. Penonton dan artis internasional mulai mengasosiasikan Indonesia dengan kriminalitas dan pengalaman tidak menyenangkan. Stigma demikian memengaruhi keputusan mereka untuk kembali atau bahkan berpartisipasi dalam acara musik lainnya yang diadakan di negara ini. Dengan kata lain, regulasi dan keamanan selama acara musik menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan secara serius.

Promotor lokal yang ingin membawa nama besar (artis, musisi, kelompok musik) dalam industri musik dunia ke Indonesia juga akan menghadapi tantangan lebih berat. Mereka wajib bekerja ekstra keras untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu menyediakan lingkungan lebih aman dan profesional. Dampak dari kasus ini tidak dapat diabaikan. Sejauh ini, industri konser musik memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui penjualan tiket, konsumsi lokal, dan aktivitas pariwisata. Ketika acara-acara besar seperti DWP terganggu oleh insiden yang mencederai reputasi, maka efek beruntun terhadap ekonomi secara keseluruhan menjadi tidak terhindarkan.

Persepsi negatif dari publik internasional terhadap keamanan di acara musik Indonesiamempersempit peluang kolaborasi lintas negara. Artis-artis dan agensi internasional akan lebih selektif dalam memilih Indonesia sebagai destinasi tur atau kolaborasi mereka ke depan. Untuk mengatasi dampak ini, harus ada upaya kolaboratif antara pemerintah, promotor, dan komunitas musik. Pemerintah wajib menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengamanan dan menindak tegas oknum yang mencoreng nama baik negara. Di sisi lain, promotor perlu meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan acara mereka. Meski kasus ini menjadi tamparan keras bagi industri musik Indonesia, terdapat peluang untuk bangkit dengan cara mengambil pelajaran dari kasus yang terjadi. Dengan langkah perbaikan yang tepat, salah satunya dengan penindakan tegas pada oknum terlibat, Indonesia masih memiliki potensi untuk kembali menjadi tuan rumah acara musik berskala internasional dan memulihkan kepercayaan global.

### **Pengamanan Berlebihan**

Sejatinya, di pelbagai negara maju, konser musik kebanyakan tidak membutuhkan penjagaan polisi berlebihan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran kolektif di antara penonton bahwa mereka hadir untuk menikmati musik, bukan untuk menciptakan konflik. Hal itu berbeda dengan pertunjukan orkes dangdut di lapangan

kecamatan, datang dengan baju rapi, pulang dengan wajah bengap babak belur. Ketiadaan pengamanan berlebihan juga mencerminkan kepercayaan penyelenggara dan masyarakat terhadap kedewasaan penonton. Penonton di negara-negara maju cenderung memahami bahwa konser adalah ruang untuk berbagi pengalaman positif. Bukan tempat untuk mencari masalah. Dengan kata lain, perilaku penonton memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pengamanan yang diperlukan.

Penjagaan polisi berlebihan di acara musik dapat memberikan kesan negatif, seolah-olah penonton dianggap sebagai ancaman. Ini bisa merusak suasana acara dan mengurangi kenyamanan para pengunjung. Bukan rahasia jika biaya yang dikeluarkan untuk aspek pengamanan cukup tinggi. Padahal biaya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas acara, seperti penambahan fasilitas atau penyempurnaan produksi. Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa kolaborasi antara penyelenggara, komunitas, dan penonton dapat menciptakan lingkungan aman tanpa perlu intervensi keamanan berlebihan.

Banyak negara menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan keamanan acara musik. Penyelenggara melibatkan relawan atau petugas keamanan swasta yang dilatih khusus untuk menangani situasi di konser. Tentunya, keamanan konser berbeda dengan keamanan kerumunan lain. Langkah ini tidak hanya hemat biaya, tetapi juga menciptakan suasana lebih bersahabat dibandingkan dengan kehadiran polisi dalam jumlah besar. Mengurangi ketergantungan pada polisi untuk pengamanan justru memberi ruang bagi pihak kepolisian untuk fokus pada tugas lain yang lebih mendesak. Di Indonesia, pendekatan demikian [untuk konser musik] belum diadopsi, masih disamaratakan antara menjaga penonton musik dengan penonton sepak bola. Dengan adanya kasus pemerasan itu, regulasi dan keamanan acara musik menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan secara serius. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan jika ada perubahan nyata dalam cara pengelolaan keamanan di acara-acara serupa di Indonesia mendatang.

**Aris Setiawan**  
Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta